

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008 dan Perkiraan Tahun 2009

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2008

Pada tahun 2008 ekonomi tumbuh sebesar 5,90 persen, dan tercatat sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 9,26 persen, diikuti perdagangan, hotel dan restoran (8,27 persen); keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (8,05 persen); serta angkutan dan komunikasi (7,20 persen). Sektor industri pengolahan dan pertanian yang memberikan kontribusi terbesar kedua dan ketiga setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, mampu tumbuh masing-masing sebesar 4,39 persen dan 3,12 persen.

Pada tahun 2008 kontribusi tertinggi masih didominasi oleh tiga sektor andalan yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 16,57% terhadap PDRB (Atas Harga Dasar Konstan), atau terbesar ketiga setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (29,36%), dan industri pengolahan (28,49%). Pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, ternyata kinerjanya tidak maksimal bahkan dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun. Demikian pula halnya dengan sektor industri pengolahan juga kinerjanya kurang maksimal, akibat menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor.

Tabel.3.1
Struktur Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur berdasarkan 9 Lapangan
Usaha Tahun 2008 ADHK 2000

No	Sektor	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
I	Pertanian	3,12	16,57
II	Pertambangan dan Penggalian	9,26	2,17
III	Industri Pengolahan	4,39	28,49
IV	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,11	1,91
V	Konstruksi	2,71	3,34
VI	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,27	29,36
VII	Pengangkutan dan Komunikasi	7,20	5,32
VIII	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,05	4,68
IX	Jasa-jasa	6,27	8,15
<i>PDRB</i>		5,90	100

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur 2009

Apabila

Apabila diukur dengan angka absolut PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Jawa Timur pada tahun 2008 mencapai Rp. 621,581 trilyun atau meningkat sebesar 16,2% bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang tercatat Rp. 534,919 trilyun. Dengan data jumlah penduduk dari hasil proyeksi penduduk berdasarkan data Dispenduk Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 37.094.483 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,54% maka PDRB per kapita Jawa Timur tahun 2008 mencapai Rp 16,76 juta per kapita per tahun. Angka ini secara kasar menunjukkan, bahwa secara rata-rata setiap penduduk memiliki pendapatan sekitar Rp 16,76 juta dalam setahun atau Rp.1,39 juta dalam sebulan, suatu angka diatas upah minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selanjutnya, ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2008 banyak ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 4,64%. Sedangkan, peranan konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 66,05%. Kegiatan konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama ekonomi, mampu tumbuh lebih baik seiring meredanya tekanan inflasi dan membaiknya keyakinan konsumen. Aktivitas konsumsi ini didukung oleh adanya beberapa hari raya dan liburan panjang yang mengiringinya. Penjualan barang *durable goods* seperti kendaraan bermotor masih mampu tumbuh meskipun melambat karena suku bunga kredit yang tinggi. Tabungan masyarakat menjadi sumber pembiayaan konsumsi di samping kredit perbankan. Kegiatan investasi swasta tumbuh melambat meskipun masih dalam tren perbaikan. Investasi ini diperkirakan merupakan realisasi barang modal yang telah dikumpulkan beberapa waktu sebelumnya sehingga tidak terpengaruh langsung oleh krisis ekonomi global. Kinerja Ekspor menurun dan neraca perdagangan luar negeri kembali defisit. Ekspor ke Amerika terus menampakkan penurunan, khususnya pada produk furnitur dan hasil perikanan. Sedangkan volume impor mulai menurun meskipun secara nilai masih tumbuh tinggi karena pelemahan nilai tukar Rupiah.

Tabel 3.2
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Penggunaan
Tahun 2008

No	Sektor	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
I	Konsumsi rumah tangga	4,64	66,05
II	Konsumsi lbg Sos tdk mencari untung	1,54	0,66
III	Konsumsi pemerintah	11,59	7,64
IV	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,97	18,17
V	Perubahan stok	-29,04	3,25
VI	Ekspor	5,86	44,42
VII	Impor	3,52	40,19
PDRB		5,94	100,00

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur 2009

Krisis

Krisis finansial global telah memupuskan kinerja ekspor non-migas Jawa Timur yang sebelumnya berkembang relatif menggembirakan. Kontribusi realisasi nilai ekspor non-migas Jawa Timur terhadap realisasi nilai ekspor non-migas nasional selama ini cukup tinggi. Pada tahun 2005 mencapai 10,72%, kemudian meningkat menjadi 11,33% pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 menjadi 12,92%.

Kinerja ekspor non-migas Jawa Timur tahun 2008 mencapai 11,099 miliar dolar AS, atau sedikit menurun dibanding tahun 2007 yang mencapai 11,429 miliar dolar AS. Meski capaian pada tahun 2008 tersebut mengalami penurunan, namun demikian pencapaian ini menempatkan Jawa Timur pada posisi kedua dalam memberikan kontribusi ekspor nasional, setelah sebelumnya menempati urutan ketiga.

Pesatnya pertumbuhan ekspor ini didukung oleh 10 komoditas utama Jawa Timur, yaitu pengolahan tembaga, timah; kimia dasar; pengolahan kayu; besi baja; pulp dan kertas; makanan dan minuman; tekstil; pengolahan karet; udang dan alat-alat listrik. Kesepuluh komoditas tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor Jawa Timur, yaitu sebesar 78,10%. Adapun sepuluh negara tujuan utama ekspor Jawa Timur adalah Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, RRC, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Australia dan Jerman.

Nilai impor Jawa Timur pada tahun 2008 mencapai 11,878 miliar dolar AS, sedangkan pada tahun 2007 tercatat sebesar 7,264 miliar dolar AS, atau meningkat dibandingkan tahun 2006, yang mencapai 5,499 miliar dolar AS. Adapun sepuluh komoditas utama impor non-migas Jawa Timur adalah besi baja, kimia dasar, makanan dan minuman, makanan ternak, pulp dan kertas, hasil pertanian, pengolahan aluminium, barang-barang kimia, tekstil dan biji lainnya. Sedangkan sepuluh negara utama asal impor Jawa Timur meliputi Singapura, RRC, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Jepang, India, Thailand dan Taiwan.

Sementara itu, perkembangan investasi di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Pada periode Januari-November tahun 2008, tercatat ada 82 proyek penanaman modal asing (PMA) yang telah terealisasi senilai 2,5 juta dolar AS. Pada periode sama tahun sebelumnya hanya terdapat 70 proyek investasi baru yang terealisasi dengan nilai 759 ribu dolar AS. Untuk proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN), pencapaiannya juga meningkat, dari 17 proyek pada Januari-November tahun 2007 dengan nilai Rp 16,28 triliun, menjadi 27 proyek dengan nilai Rp 19,24 triliun pada periode yang sama tahun 2008.

Meski

Meski demikian, perkembangan investasi itu diperkirakan tidak mampu menyerap kembali tenaga kerja korban PHK, sekaligus angkatan kerja baru akibat krisis finansial global. Sebab, jika bercermin pada tahun 2007, di mana ketika itu terdapat 22 proyek PMDN baru senilai Rp 16.705.091 juta, tenaga kerja yang diserap sebanyak 35.237 orang Indonesia, dan 5.360 tenaga kerja asing. Sedangkan proyek PMA sebanyak 85, dengan nilai investasi 855.227.000 dolar AS, menyerap 18.067 tenaga kerja Indonesia, dan 9 tenaga kerja asing.

Total tenaga kerja Indonesia yang bisa diserap melalui investasi (PMDN dan PMA) pada tahun 2007 sebanyak 53.304 orang. Sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2007 sebanyak 693.798 orang, dan jumlah penganggur mencapai 1.366.503 orang. Pada tahun 2009, kondisi ini diperkirakan tidak jauh berbeda, dan masih ditambah tenaga kerja korban PHK, dan juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan. Tapi bagaimanapun, investasi dan ekspor non-migas Jawa Timur harus tetap didorong untuk terus meningkat.

3.1.2. Proyeksi Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah 4,0% – 4,5%. Untuk dapat mencapai target tersebut kondisi ekonomi Jawa Timur tahun 2009 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional sebagai berikut:

1) Lingkungan eksternal (Global)

Pertama, memburuknya perekonomian dunia yang diawali dengan adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat yang disebabkan oleh jatuhnya pasar surat utang "*subprime mortgage*" atau kredit kepemilikan rumah (KPR) di Amerika Serikat. Melemahnya ekonomi Amerika Serikat menyebabkan meningkatnya persentase gagal bayar debitor KPR segmen tersebut. Akibatnya, harga surat utang subprime mortgage jatuh. Kejatuhan harga surat utang subprime mortgage membawa kerugian bagi bank dan perusahaan pengelola dana (*fund management*) yang membeli surat utang tersebut dan ternyata yang memiliki surat utang *subprime mortgage* bukan hanya perbankan di Amerika Serikat, tetapi ada juga perbankan di Australia, Singapura, Taiwan, China, atau di India. Perbankan di benua lain pasti juga memiliki eksposur ke surat utang *subprime mortgage* yang akibatnya, harga saham perbankan di seluruh dunia jatuh. Berhubung psikologi pasar selalu cenderung

cenderung ekstrem, banyak pelaku pasar percaya bahwa meruginya perbankan besar akan berdampak kepada pelambatan laju pertumbuhan kredit, dan pelambatan kegiatan ekonomi yang selanjutnya berdampak pada jatuhnya harga saham nonperbankan di seluruh dunia yang tentu saja akan mempengaruhi nilai perdagangan antar negara.

Kedua, Melambungnya harga bahan baku pangan khususnya biji-bijian seperti jagung, kedelai di tingkat nasional sebagai akibat lonjakan harga di tingkat dunia akan memberi dampak terhadap kenaikan barang – barang substitusi serta ketahanan pangan di Jawa Timur, sehingga diperlukan upaya untuk tetap menjaga kestabilan harga di tingkat nasional

Ketiga:. Adanya gagasan pengembangan kerjasama ekonomi di kawasan-kawasan regional terutama di negara-negara tetangga. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Jawa Timur. Untuk itu diperlukan upaya keterlibatan Jawa Timur dalam hal kerjasama ekonomi di kawasan-kawasan tersebut.

Keempat : Makin kuatnya isue-isue non tarif (misalnya isue HAM, *Trafficking*, *illegal logging*) yang dikenakan oleh negara-negara maju terhadap produk-produk dari negara berkembang.

2) Lingkungan Internal (Nasional)

Pertama: Membaiknya kondisi ekonomi makro nasional didukung oleh terjaganya laju inflasi, stabilnya nilai tukar rupiah, dan suku bunga SBI yang makin kondusif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua : Tingginya komitmen pemerintah pusat terhadap pemberdayaan sektor riil dan UMKM serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Ketiga : Besarnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keempat : Salah satu yang menguntungkan saat ini adalah makin meningkatnya ruang gerak fiskal dari Pemerintah Pusat sebagai akibat menurunnya harga minyak dunia, sehingga menurunkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Semakin meningkatnya ruang gerak fiskal dari Pemerintah Pusat akan mendorong meningkatnya potensi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari dana perimbangan, sehingga kapasitas pembiayaan untuk pembangunan daerah semakin meningkat.

Kelima

Kelima : adanya pemilihan kepala daerah yang salah satunya Pemilihan Presiden untuk masa jabatan 2009-2014, akan menyebabkan dunia usaha menghadapi ketidakpastian di bidang stabilitas politik dan keamanan.

3) Lingkungan Internal (propinsi)

Pertama: Tingginya komitmen pemerintah propinsi terhadap pemberdayaan sektor riil dan UMKM serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkualitas.

Kedua : Membaiknya kondisi makro ekonomi Jawa Timur didukung dengan tingkat inflasi Jawa Timur yang tetap terkendali, hal ini ditandai dengan masih terkendalinya stabilitas harga-harga di Jawa Timur bahkan angka inflasi Jawa Timur ini masih lebih rendah dari nasional.

Ketiga : Intermediasi sektor perbankan untuk bisa mendorong percepatan ekonomi daerah masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan tingkat penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur yang masih rendah.

Keempat: Sering terjadinya bencana alam merupakan faktor internal yang harus disikapi, khususnya bencana lumpur LAPINDO yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Kelima: Seperti halnya perekonomian nasional, perekonomian Jawa Timur juga dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer yang disertai makin meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011.

3.2.1. Tantangan Perekonomian 2010 dan 2011

Dengan kemajuan perekonomian yang dicapai pada tahun 2008 dan masalah yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2009, maka tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penanggulangan kemiskinan

Tingginya jumlah penduduk miskin merupakan masalah yang harus diupayakan penanggulangannya. Hal ini memerlukan upaya yang bersifat pemberdayaan masyarakat

masyarakat miskin, ini akan menjadi penting karena akan mendudukan masyarakat miskin bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (*Liabilities*) menjadi potensi (*asset*).

2. Peningkatan penanganan pengangguran

Akibat krisis keuangan global akan berdampak pada perekonomian baik nasional maupun regional, ternyata belum dapat sepenuhnya menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya bertambah, terutama penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Disamping itu tingkat pendidikan, ketrampilan/ keahlian dan kompetensi tenaga kerja masih rendah. Sementara disisi lain tuntutan dunia kerja akan kebutuhan tenaga kerja trampil, ahli dan kompeten semakin meningkat seiring dengan tuntutan perkembangan ekonomi global.

3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan ini cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa menggerakkan kegiatan sektor riil, yang bisa meningkatkan produktifitas. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku lokal serta memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar.

4. Stabilitas Sosial dan Politik (penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat).

Pada tahun 2009 akan dilaksanakan pemilihan Presiden untuk masa jabatan 2009-2014. Kondisi ini diperkirakan akan menciptakan kenaikan suhu politik dan kerawanan keamanan di Jawa Timur. Tentunya hal itu akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan sosial dan ekonomi.

5. Penanganan Bencana Alam.

Kejadian Bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di Jawa TImur menjadikan suatu persoalan yang harus selalu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan bencana yang terjadi tidak saja membawa penderitaan bagi penduduk yang tertimpa bencana, namun juga dapat menyebabkan sarana dan prasarana yang sudah terbangun rusak dan hilang fungsinya. Kondisi ini selanjutnya dapat membawa dampak gangguan kepada transportasi, areal produksi (sawah/industri) serta mobilitas masyarakat dan perdagangan (*business*) yang akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian.

3.2.2. Prospek

3.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2010 dan Tahun 2011

Kondisi perekonomian di Jawa Timur sudah mengindikasikan ke arah keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang menunjukkan peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur telah mencapai 5,80% dan pada tahun 2007 yaitu mencapai 6,11%. Selanjutnya pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,90% dan pada tahun 2009 diperkirakan menjadi sekitar 4,0%–4,50% dan diperkirakan pada tahun 2010 masih berkisar 4,0%–4,5% sedangkan pada tahun 2011 diperkirakan menjadi sekitar 5,0%–5,5%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2010 dan 2011, jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pertumbuhannya masih akan ditopang oleh tiga sektor pendukung utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor pertanian.

Dari sisi moneter, Kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Jawa Timur tahun 2010 dan 2011. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata bisa ditekan pada angka sekitar 7%-8% per tahun, maka prospek ekonomi Jawa Timur 2010 dan 2011 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 4,0%–4,5% dan tahun 2011 bisa mencapai 4,5%–5,0%.

Dibidang perbankan, diharapkan bank-bank di Jawa Timur dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil dengan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit kepada UMKM serta revitalisasi KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), sehingga peran bank-bank di Jawa Timur dapat ditingkatkan untuk dapat memberikan kredit-kredit modal usaha kepada UMKM dengan bunga yang terjangkau.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dan melihat tantangan yang dihadapi, maka ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas

berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan upaya penanganan kemiskinan, melalui:

- 1) Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;
- 2) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih unggul dan faktor penunjangnya.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan;
- 4) Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- 5) Menciptakan Regulasi yang menjamin kepastian usaha dan penegakkan hukum serta memperbaiki kebijakan investasi sesuai praktik internasional terbaik.
- 6) Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor, serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir, melalui perluasan basis produk ekspor, peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap.
- 7) Meningkatkan dan perbaiki ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi dan ekspor, termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan.
- 8) Meningkatkan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan agroindustri/agrobisnis, dan pembangunan kawasan agropolitan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.
- 9) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, melalui pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.
- 10) Memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (*multiplier*).
- 11) Mengembangkan industri manufaktur utamanya pada subsektor prioritas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

3.4. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD

Dana desentralisasi merupakan dana yang pengelolaannya merupakan urusan Pemerintah Daerah dengan berbagai perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah. Sumber-sumber dana desentralisasi berasal dari PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah, yang pada tahun 2010 diperkirakan sebesar **Rp. 7.070.149.968.453,-** terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mencapai **Rp. 4.843.245.172.239,-**
- 2) Dana Perimbangan Pemerintah Pusat diperkirakan mencapai **Rp. 2.214.004.798.214,-**
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperkirakan mencapai **Rp.12.900.000.000,-**

3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN

Dana dekonsentrasi secara filosofis merupakan dana yang perencanaan, keputusan besaran alokasi ditentukan oleh Pemerintah, dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD Provinsi serta pelaporannya mengacu pada PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2009 Pemerintah Propinsi Jawa Timur menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 4,055 trilyun dan diperkirakan pada tahun 2010 sebesar Rp. 4,628 trilyun dengan asumsi kenaikan belanja dekonsentrasi sekitar 14 % yang didasarkan pada pertumbuhan penerimaan pajak non Migas.

3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Pada tahun 2009 Pemerintah Propinsi Jawa Timur menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 1,519 trilyun dan pada tahun 2010 diusulkan melalui Musrenbang Nasional Tahun 2009 sebesar Rp. 5,879 trilyun.

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pergantian Pemerintah dari orde baru kepada orde reformasi menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya dan

perimbangan

perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai demokrasi dan peran serta masyarakat. Secara konkrit pengaturan ini dilakukan dengan telah diterbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berlakunya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah. Untuk itu, pengaturan alokasi sumber daya daerah yang dapat memberi kepuasan bagi masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja serta perwujudan layanan publik yang efisien, menjadi sangat penting.

Propinsi sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik dan pembangunan daerah.

Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi di Jawa Timur Tahun 2010 dari Pos Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 7.070.149.968.453,-** sedangkan Pos Belanja Daerah yang sebesar **Rp. 7.344.261.933.930,-** Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 mengalami defisit sebesar **Rp. 274.111.965.477,-**. Defisit APBD 2010 tersebut ditutup dari selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar **Rp. 274,111.965.477,-** yang berasal dari Estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2009 sebesar **Rp. 305. 852.600.000,-** dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp. 31.740.634.523,-**.

sumber

Sumber pendapatan APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun 2010 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 4.843.245.172.239,-, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.214.004.796.214,- dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 12.900.000.000,-.

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) disumbang dari Sub Pajak Daerah sebesar Rp. 4.082.150.000.000, Retribusi Daerah sebesar Rp. 65.198.926.000,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 239.267.670.239,- Milyar dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 456.628.576.000,-. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 944.087.831.214,-, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.212.934.765.000,- dan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 12.900.000.000,-.

Selanjutnya pada Pos Pembiayaan Daerah terdiri yang terdiri dari Pos Penerimaan dan Pengeluaran meliputi Pos Penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2009 (SiLPA) sebesar Rp. 305.852.600.000,- dan Pos Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 31.740.634.523,-.

3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2010 diarahkan pada:

- a. Optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
- b. Perluasan dan peningkatan Sumber Penerimaan dan Pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib Administrasi Keuangan Daerah;
- c. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
- f. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
- g. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

h. Peningkatan

- h. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan *coverage ratio* yang ada,
- i. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- j. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Propinsi dalam pemungutan pajak sifatnya limitatif, yaitu Pemerintah Propinsi tidak dimungkinkan untuk menambah jenis-jenis pajak baru. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan melalui intensifikasi Pajak Daerah. Khusus ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah hanya dimungkinkan pada sektor Retribusi Daerah dan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan Drive Through, Pelayanan

Samsat

Samsat Link, Payment Point, Samsat Corner, Samsat Keliling, Samsat Delivery, Samsat Quick Respon (SQR). Selain itu pengembangan Teknologi Informasi dilingkungan KB Samsat antara lain SMS Info Samsat, SMS JT, dan SMS Komplain.

2. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan Potensi Daerah.

Dengan Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar Dinas dilingkungan Propinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitasi kerja sama dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Daerah pada Tahun 2010 diproyeksikan mencapai **Rp 7.070.149.968.453,-** yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar **Rp 4.843.245.172.239,-** dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar **Rp 2.214.004.796.214,-** dan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar **Rp 12.900.000.000,-**.

3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Kebijakan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2010 diarahkan pada:

- a. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;
- b. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif;

c. Mengarahkan

- c. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan melalui pendekatan program padat karya.
- d. Stimulasi pertumbuhan sektor riil melalui penyediaan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM;
- e. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
- f. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
- g. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan g. Pemenuhan Pemerintah Propinsi, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat tahun jamak (*multi years*) sesuai tahapan.
- i. Belanja penanganan bencana alam dan paska bencana alam dialokasikan dengan pola "ploting mengambang" yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan.
- j. Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- k. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pada RKPD Tahun Anggaran 2010, dialokasikan dana untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.591.213.476.857,-**, meliputi : Belanja Pegawai sebesar **Rp. 1.540.134.332.900**, Belanja Hibah dialokasikan sebesar **Rp. 216.470.000.000,-**, Belanja Bantuan Sosial sebesar **Rp. 39.200.000.000,-**, Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa sebesar **Rp. 1.460.546.193.036,-**, Belanja Bantuan Keuangan sebesar **Rp. 304.719.000.000,-** dan

dan Belanja Tak Terduga sebesar **Rp. 30.000.000.000,-**. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar **Rp. 3.753.048.457.073,-** yang terdiri dari belanja langsung eks Rutin sebesar **Rp. 893.709.067.830,-** dan eks Pembangunan sebesar **Rp. 2.859.339.389.243,-**.

Adapun belanja Langsung yang terkait dengan eks Pembangunan serta program dan kegiatan dan dialokasikan di seluruh SKPD berdasarkan urusan wajib dan Urusan Pilihan sebagai berikut :

NO.	URUSAN/SKPD	PAGU INDIKATIF
1	Dinas Pendidikan	900.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan + UPT (3 RSK Kusta dan 2 RSK Paru)	260.000.000.000,00
3	RSU Dr. Soetomo Surabaya	24.001.225.000,00
4	RSU. Dr. Syaiful Anwar Malang	13.000.000.000,00
5	RSU. Dr. Soedono Madiun	7.973.000.000,00
6	Rumah Sakit Haji Surabaya	17.500.000.000,00
7	RS Jiwa Menur Surabaya	7.500.000.000,00
13	DPU Bina Marga	216.506.400.000,00
14	DPU Pengairan	89.954.200.000,00
15	DPU Cipta Karya dan Tataruang	147.900.000.000,00
16	Bappeda	54.500.000.000,00
17	Dinas Perhubungan dan LLAJ	107.000.000.000,00
18	Badan Lingkungan hidup	19.100.000.000,00
19	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	11.000.000.000,00
20	Dinas Sosial	50.435.641.143,00
21	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	65.550.000.000,00
22	Dinas Koperasi dan UMKM	79.672.000.000,00
23	Badan Penanaman Modal	5.200.000.000,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.100.000.000,00
25	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	19.500.000.000,00
26	Bakesbang & Politik	8.800.000.000,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	5.500.000.000,00
28	Badan PBD	5.600.000.000,00
29	PH Badan Narkotika Daerah	4.400.000.000,00
31	Biro Adm. Pemerintahan Umum	8.120.000.000,00
32	Biro Adm. Kerjasama	7.725.000.000,00
33	Biro Hukum	5.400.000.000,00
34	Biro Adm. Perekonomian	17.920.000.000,00

NO.	URUSAN/SKPD	PAGU INDIKATIF
35	Biro Adm. Pembangunan	9.520.000.000,00
36	Biro Adm. Sumber Daya Alam	4.300.000.000,00
37	Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat	13.300.000.000,00
38	Biro Adm. Kemasyarakatan	28.700.000.000,00
39	Biro Humas dan Protokol	8.000.000.000,00
40	Biro Organisasi	5.584.000.000,00
41	Biro Keuangan	37.150.000.000,00
42	Biro Umum	1.825.723.100,00
43	Sekretariat DPRD	64.500.000.000,00
44	Balitbang	4.000.000.000,00
45	Inspektorat Propinsi	10.349.600.000,00
46	Dinas Pendapatan	37.934.000.000,00
47	Kantor Perwakilan Jawa Timur	4.760.000.000,00
48	Bakorwil I Madiun	3.500.000.000,00
49	Bakorwil II Bojonegoro	3.500.000.000,00
50	Bakorwil III Malang	3.500.000.000,00
51	Bakorwil IV Pamekasan	3.500.000.000,00
52	Badan Kepegawaian Daerah	9.720.000.000,00
53	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.400.000.000,00
54	Setwan Pembina KORPRI	2.750.000.000,00
55	Badan Ketahanan Pangan	14.500.000.000,00
56	Badan Pemberdayaan Masyarakat	74.750.000.000,00
57	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.380.000.000,00
58	Sekretariat KPID	2.000.000.000,00
59	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	10.250.000.000,00
60	Dinas Pertanian	33.960.000.000,00
61	Dinas Perkebunan	28.200.000.000,00
62	Dinas Peternakan	32.500.000.000,00
63	Dinas Kehutanan	17.048.600.000,00
64	Dinas Energi dan SDM	12.400.000.000,00
65	Dinas Perikanan dan Kelautan	97.700.000.000,00
66	Dinas Perindustrian dan Perdag.	86.000.000.000,00
	JUMLAH	2.859.339.389.243,00

Sedangkan matrik rencana kerja RKPD Tahun 2010 diuraikan pada Bab IV.

3.5.3. Arah

3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membawa pro dan kontra terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial ;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;

- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2010 diarahkan :

a. Dari Sisi Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan daerah Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
2. Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
3. Penggunaan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.
4. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai model, antara lain, *Leases and Concession* (LC), *Built, Operations and Transfer* (BOT), atau *Public Private Partnership*;
5. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
6. Mengembangkan privatisasi/swastanisasi;
7. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR);
8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
9. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng ;
10. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat;
11. Optimalisasi pemanfaatan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).

b. Dari

b. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Daerah

Sumber pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya;
3. Memberikan *Public Service Obligation* (PSO) kepada BUMD yang tarif layanannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.